

Tourism SNAPSHOT

Vol.1 No. 1 2025

Table of Content:

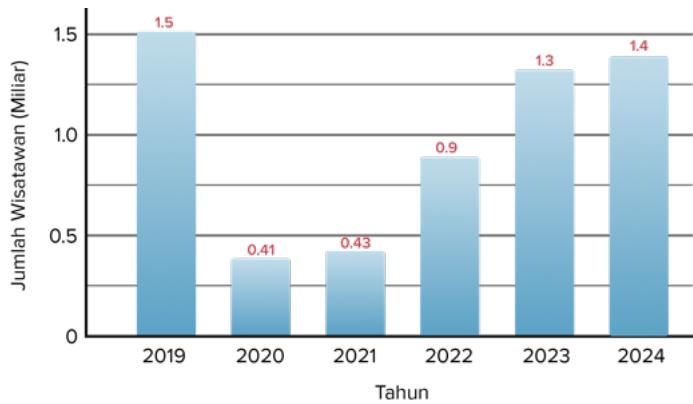
- Pemulihan Pariwisata Global
- Resiliensi Pariwisata Indonesia
- Potensi Krisis Pariwisata Indonesia 2025
- Dampak Geopolitik Global
- Rekomendasi Strategis

BEYOND RECOVERY: Toward Transformation in Indonesia's Tourism Resiliency

PEMULIHAN PARIWISATA GLOBAL

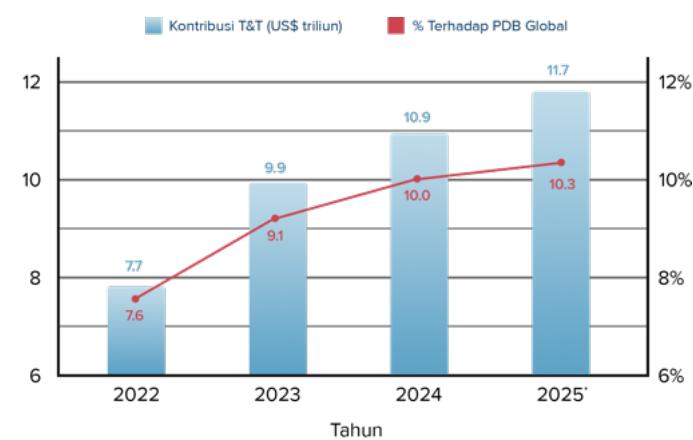
Sektor Pariwisata pada tahun awal 2025 dapat dikatakan mengalami pemulihan penuh jika dibandingkan dengan periode sebelum Pandemi Covid-19. Pemulihan ini ditunjukkan dengan jumlah wisatawan global telah mencapai angka 1,4 miliar pada Tahun 2024. Capaian ini, mendekati jumlah wisatawan global sebelum masa pandemi pada tahun 2019 (1,5 miliar). Meskipun laju pertumbuhan ini lebih moderat dibandingkan lonjakan besar pasca pandemi, hal ini menunjukkan normalisasi pasar yang sehat dan solid pada tahun 2025.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB global menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, sektor *Travel & Tourism* (T&T) berkontribusi sebesar US\$9,5 triliun atau 9,9% dari PDB global dan hanya mengalami penurunan sekitar 5% di bawah puncaknya pada 2019 (sekitar US\$10 triliun) setelah pandemi Covid-19. Pemulihan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan volume perjalanan, tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan di seluruh rantai nilai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2024, kontribusi sektor *Travel & Tourism* (T&T) meningkat menjadi US\$10,9 triliun atau 10% PDB global. Sementara itu, pada tahun 2025 kontribusi ini diproyeksikan mencapai US\$11,7 triliun atau 10,3% dari PDB global - melampaui tingkat pra pandemi. Capaian ini mempertegas posisi strategis sektor pariwisata global dalam pemulihan dan transformasi ekonomi dunia.



Kedatangan Wisatawan Internasional Global 2019-2024

Sumber: UN Tourism Data Dashboard, 2024.



^a) estimasi dalam Economic Impact Research 2024

Kontribusi PDB Sektor Travel & Tourism

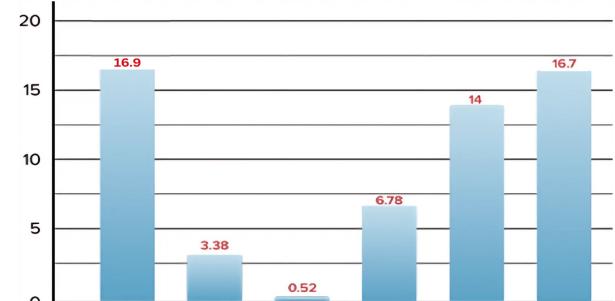
Sumber: World Travel & Tourism Council (WTTC), Economic Impact Research 2024.

RESILIENSI PARIWISATA INDONESIA

Pemulihan pariwisata yang terjadi di level global, juga dialami sektor Pariwisata di Indonesia, khususnya juga dilihat dari devisa dan kontribusi sektor terhadap PDB.

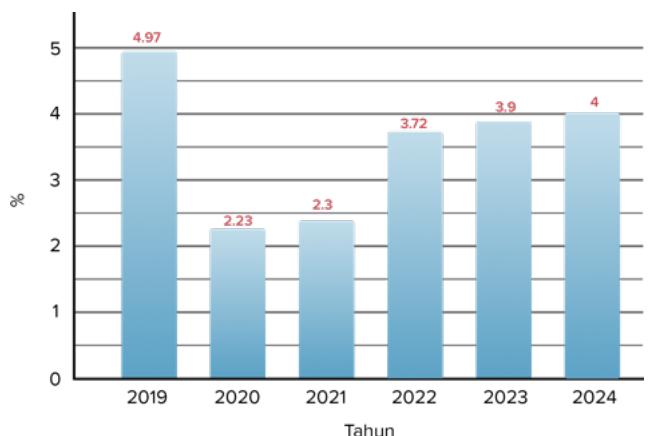
Pada tahun 2019, devisa pariwisata mencapai puncaknya sebesar US\$16,9 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 - 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terlihat pada 2022, di mana devisa naik menjadi US\$6,78 miliar seiring pelonggaran kebijakan dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan devisa melonjak hampir dua kali lipat menjadi US\$14,0 miliar, dan mencapai US\$16,7 miliar.

Kontribusi pariwisata terhadap PDB pada tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, kontribusi pariwisata mencapai puncaknya sebesar 4,97%, menunjukkan peran penting sektor ini sebelum pandemi COVID-19. Namun, dampak pandemi tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 - 2021. Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dengan kontribusi naik menjadi 3,72%, diikuti kenaikan lebih lanjut menjadi 3,9% pada 2023. Untuk tahun 2024, diperkirakan kontribusi pariwisata mencapai 4% terhadap PDB, hal ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang terus berlanjut untuk tahun berikutnya.



Devisa Pariwisata 2019 - 2024

Sumber: BPS (diolah)

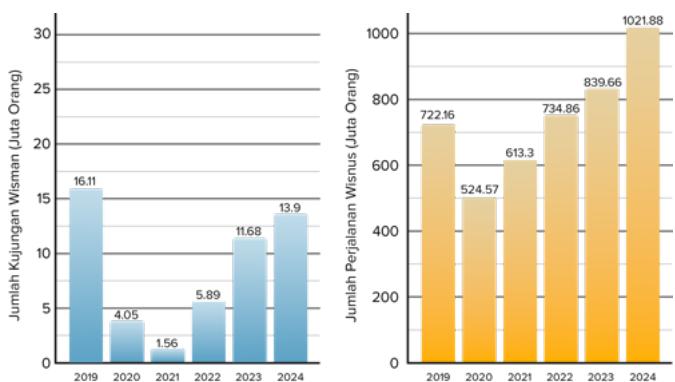


Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB 2019-2024

Sumber: BPS, Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2024/2025, Siaran Pers Kemenko Ekon, 03/2025 (diolah)

Pemulihan sektor pariwisata Indonesia terjadi pada beberapa indikator penting, seperti Jumlah Kunjungan Wisman dan Perjalanan Wisnus. Namun demikian, beberapa data seperti Tingkat Penghunian Kamar (TPK) menunjukkan indikasi yang berlawanan.

Jumlah kunjungan wisman sebelum pandemi Covid-19 sebesar 16,1 juta. Namun, mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022 sampai 2024, kunjungan wisman menunjukkan tren yang positif walaupun belum mencapai angka sebelum pandemi Covid-19. Di sisi lain, wisatawan nusantara (Wisnus) menunjukkan tren yang sama dengan perjalanan Wisman, dimulai dari 722,16 juta jumlah kunjungan pada tahun 2019, turun menjadi 524,57 juta pada 2020, lalu bangkit dengan pertumbuhan stabil menjadi 613,3 juta pada 2021, 734,86 juta pada 2022, 839,66 juta pada 2023, dan melonjak spektakuler ke 1,021 miliar kunjungan pada 2024.

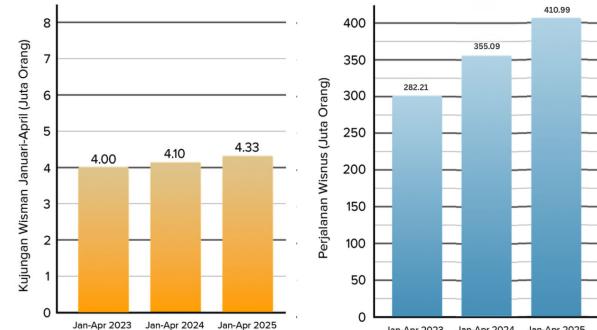


Tren Wisman dan Wisnus 2019-2024

Sumber: BPS, Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara dan Nusantara 2025

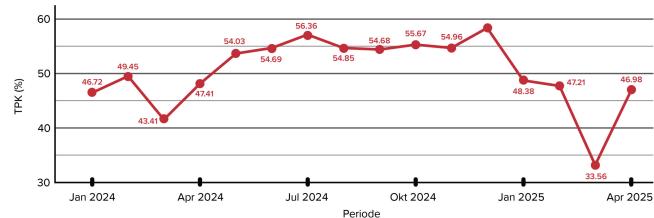
Memasuki tahun 2025, secara kumulatif dari Januari hingga April, angka **kunjungan Wisman** mencapai 4,33 juta, naik 5,6% dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Selaras dengan hal tersebut, **perjalanan Wisnus menunjukkan tren peningkatan pada periode Januari-April 2025**, yaitu sebesar 410,99 juta perjalanan atau naik 10,65% jika dibandingkan dengan rentang periode yang sama pada tahun 2024.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Maret 2025, turun drastis ke angka 33,56, jauh merosot jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (43,41). Meskipun meningkat kembali pada April 2025 ke 46,98, hal ini lebih diakibatkan efek liburan Idul Fitri. Fakta ini menunjukkan adanya ancaman perlambatan yang nyata pada perekonomian di Indonesia memasuki tahun 2025.



Perbandingan Kunjungan Wisman dan Perjalanan Wisnus Januari-April 2023-2025

Sumber: BPS (diolah)



Tingkat Hunian Kamar Januari 2024 - April 2025

Sumber: BPS (diolah).

POTENSI KRISIS PARIWISATA INDONESIA 2025

Fakta berbasis survei nasional dan daerah yang dilakukan beberapa lembaga di Indonesia menunjukkan indikasi yang sangat jelas bahwa sektor pariwisata di Indonesia, khususnya perhotelan dan restoran, mengalami tekanan yang serius memasuki tahun 2025.

Berbicara terkait tingkat okupasi dan pendapatan hotel, pada level nasional, survei Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Horwath HTL mengungkap bahwa **lebih dari 50% hotel berbintang mengalami penurunan pendapatan lebih dari 10% sejak November 2024** (PHRI & Horwath HTL, 2025).

Survei BPD PHRI Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa sedang mengalami tekanan besar pada sektor perhotelan dan restoran selama triwulan pertama 2025. **Sebanyak 96,7% hotel dan restoran melaporkan penurunan kunjungan dibandingkan periode sebelumnya** (PHRI, 2025). Temuan ini memperlihatkan tekanan simultan dari sisi permintaan, khususnya pada segmen MICE dan perjalanan dinas, yang terdampak oleh kebijakan efisiensi belanja sektor publik.

Hal tersebut tentunya berdampak pada tenaga kerja di sektor pariwisata. Secara nasional, survei PHRI bekerja sama dengan Horwath HTL mencatat bahwa **88% hotel berbintang di 30 provinsi telah mempersiapkan PHK sebagai upaya mengurangi biaya operasional sejak Maret 2025** (PHRI & Horwath HTL, 2025).

Survei BPD PHRI Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa 70% pelaku usaha hotel dan restoran sedang merencanakan PHK massal sebesar 10–30%, sementara 37,7% mempertimbangkan memangkas jumlah staf tetap (PHRI DIY & BPD PHRI, 2025). Di Yogyakarta, KSPSI DIY mengestimasi bahwa sekitar **10.000 pekerja pariwisata terancam kehilangan pekerjaan akibat efektivitas Inpres No. 1 Tahun 2025** (KSPSI DIY, 2025).



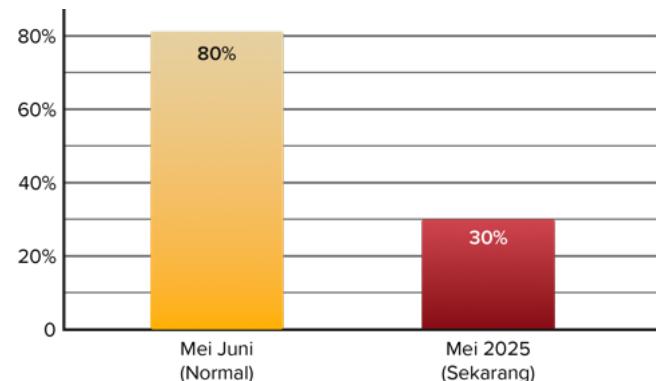


Industri pariwisata di Indonesia mengalami beberapa potensi ancaman yang bersumber dari adanya praktik ilegal perusahaan di sektor penyediaan akomodasi. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah, seperti pelarangan study tour juga berdampak cukup besar bagi sektor pariwisata di Indonesia.

Industri pariwisata juga menghadapi tantangan berupa banyaknya pengusaha akomodasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan. Selain itu, banyak pula vila yang dimiliki oleh Warga Negara Asing yang tidak memiliki izin yang sah. Sebagai contoh, praktik ilegal ini banyak terjadi di Bali yang menyebabkan lesunya bisnis vila resmi di Bali. **Data menunjukkan, tingkat hunian vila yang tergabung dalam Bali Villa Rentals & Management Association (BVRMA) dilaporkan anjlok hingga di bawah 30%, jauh menurun dibandingkan tingkat hunian normal sekitar 80% yang biasanya terjadi menjelang musim ramai.**

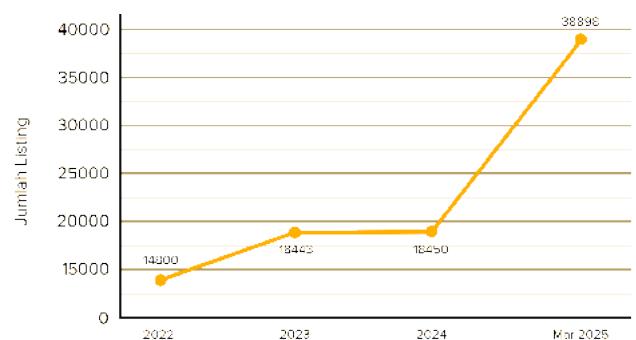
Tersedianya platform akomodasi berbasis *online* seperti AirBnB, ditengarai memicu kemudahan praktik ilegal ini. Data menunjukkan, dari **2022 hingga Maret 2025, jumlah properti aktif Airbnb di Bali melonjak 162,34%** (dari sekitar 14.800 menjadi **38.898**), dengan pertumbuhan sepanjang 2023-2024 sebesar **24,62%** (Hospitable.com, 2024).

Selain masalah tersebut, adanya pelarangan kegiatan *study tour* yang dijalankan beberapa pemerintah daerah turut memberikan dampak pada pariwisata di Indonesia. Pelarangan kegiatan *study tour* menyebabkan penurunan signifikan pada kunjungan ke destinasi wisata, khususnya desa wisata. **Destinasi yang memiliki obyek desa wisata mengalami penurunan kunjungan sebesar 40–45%, sementara desa wisata tanpa daya tarik khusus bahkan mengalami penurunan lebih tajam hingga 70–75%** (Kompas, 2025).



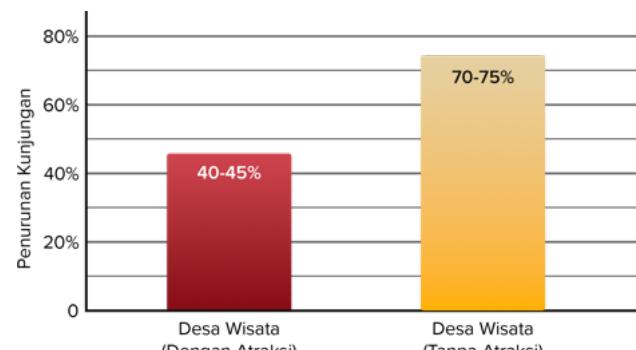
Penurunan Tingkat Hunian Vila Legal di Bali dari Musim Ramai ke Mei 2025

Sumber: BVRMA (2025)



Lonjakan Jumlah Listing Aktif Airbnb di Bali (2022-Mar 2025)

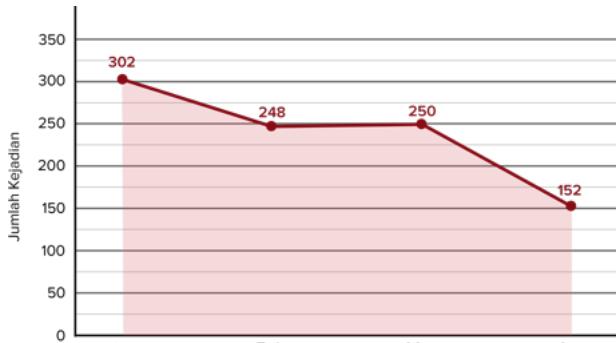
Sumber: <https://hospitable.com/bali-rental-market>



Dampak Larangan Study Tour Terhadap Kunjungan Desa Wisata

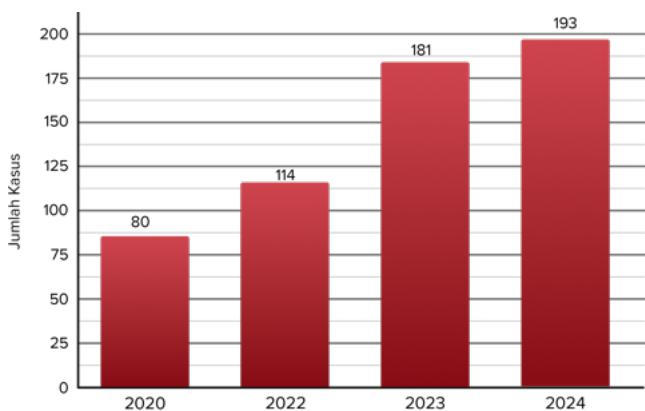
Adanya bencana dan kecelakaan pada tempat wisata memberikan dampak negatif bukan hanya pada lokasi terjadinya insiden. Dampak negatif juga terasa pada objek wisata lain. Di tengah situasi perlambatan ekonomi dan ancaman kelesuan di sektor pariwisata, penanggulangan terhadap ancaman bencana dan kasus kecelakaan menjadi krusial.

Berdasarkan data dari BNPB, **total kejadian bencana di Indonesia pada periode Januari hingga April 2025 mencapai 952 kejadian**. Meskipun terdapat tren penurunan, dari 302 kejadian di Januari menjadi 152 di April, frekuensi bencana tetap menjadi tantangan signifikan bagi sektor pariwisata. Tingginya intensitas bencana di awal tahun berpotensi mengganggu aksesibilitas dan infrastruktur wisata. Kejadian bencana yang tidak ditangani dan dikelola dengan baik, dapat menurunkan minat kunjungan wisatawan dalam jangka panjang.



Tren Kejadian Bencana di Indonesia (Januari-April 2025)

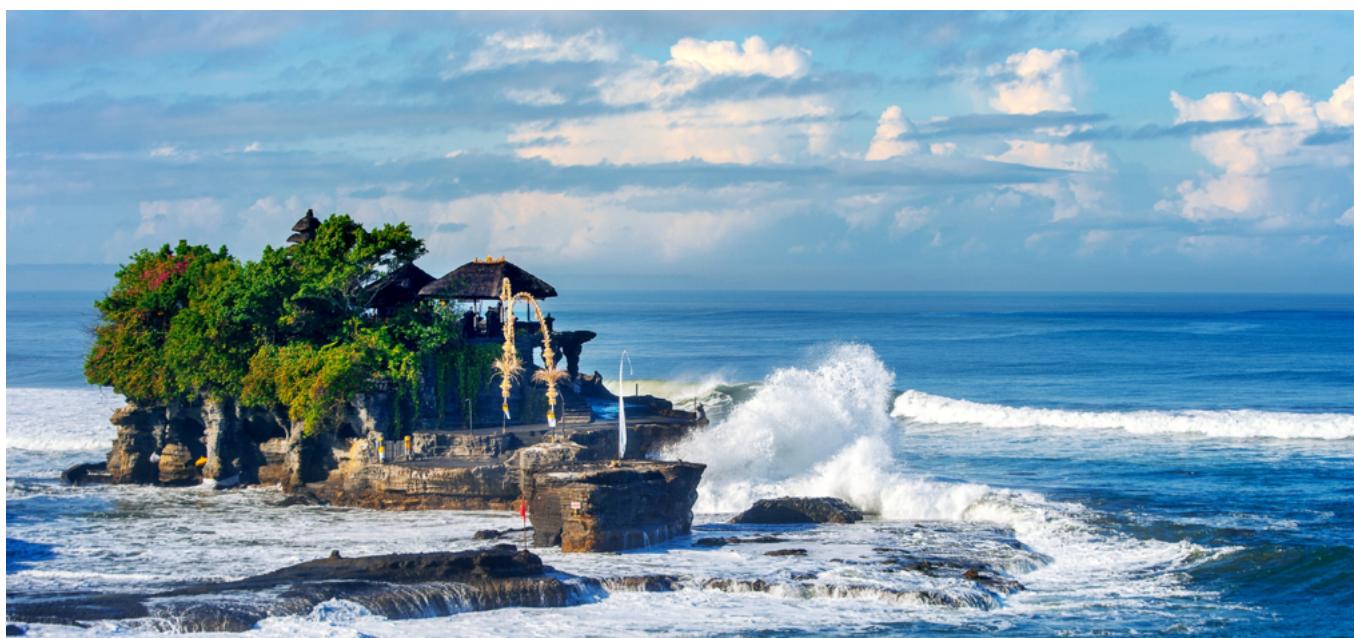
Sumber: BNPB (diolah)



Kecelakaan Bus Pariwisata di Indonesia (2020-2024)

Sumber: PT Jasaraharja Putera (diolah)

Kasus-kasus kecelakaan ini harus ditanggapi dengan baik dengan kolaborasi lintas sektor yang tepat agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap industri pariwisata nasional. Kebijakan dan respon yang tepat bertujuan memberikan rasa aman untuk wisatawan, di mana keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama dalam setiap kunjungan wisata yang tersedia.





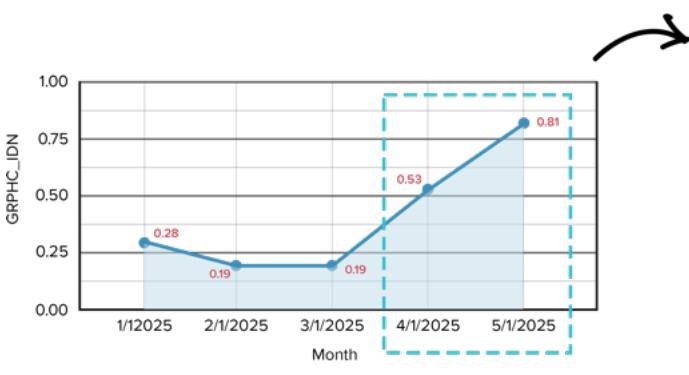
Dampak Geopolitik Global

Situasi geopolitik yang terjadi sepanjang semester pertama 2025 juga akan memberikan dampak negatif bagi pemulihan pariwisata di Indonesia. Meningkatnya ketegangan global secara tidak langsung dapat berdampak pada pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata.

Tren pemulihan pariwisata global terancam kembali tertekan dengan munculnya gejolak geopolitik global yang dapat berdampak pada stabilitas politik dalam negeri. Menggunakan pendekatan risiko geopolitik yang dikembangkan oleh Caldara dan Lacoviello (2019) melalui indeks *geopolitic risk (GPR index)*, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan signifikan terhadap sektor pariwisata pada tahun 2025. Data menunjukkan bahwa *GPR index* Indonesia mengalami peningkatan tajam dari **0.53 pada April 2025 menjadi 0.81 pada Mei 2025**. Peningkatan tajam sebesar 52.83% ini berpotensi menurunkan jumlah wisatawan mancanegara.

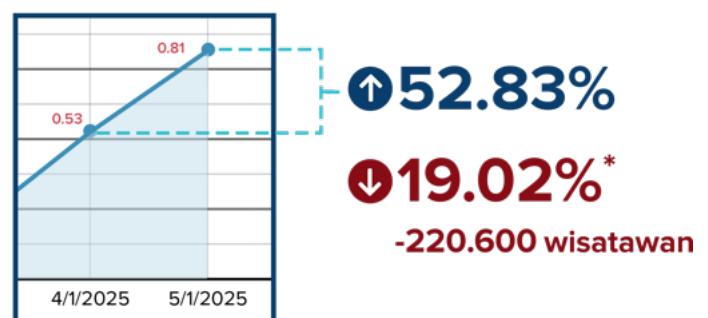
Dengan jumlah Wisman April 2025 sebanyak 1.16 juta orang (BPS, 2025), lonjakan GPR dari April ke Mei 2025 diperkirakan dapat memicu **penurunan jumlah Wisman hingga sekitar 19.02%, atau setara dengan sekitar 220.600 wisatawan**. Perhitungan ini berdasarkan koefisien elastisitas sebesar -0.36 (Gocer dan Kovacs, 2023), artinya setiap kenaikan 1% pada indeks GPR akan menyebabkan penurunan 0.36% pada jumlah wisatawan.

Estimasi penurunan wisman sekitar 220.600 dengan rata-rata pengeluaran sebesar US\$ 1.391,85 per kunjungan pada tahun 2024 kemungkinan akan memberikan dampak potensi kerugian pendapatan di sektor pariwisata mencapai US\$ 306,92 juta atau sekitar Rp5 triliun. Potensi ini dapat berubah seiring dengan kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini.



GPR Index Indonesia 2025 (monthly)

Sumber: www.matteoiacoviello.com/gpr_country.htm



*Berdasarkan koefisien elastisitas GPR terhadap jumlah wisatawan sebesar -0.36 (Gocer dan Kovacs, 2023), kenaikan indeks GPR Indonesia 52.83% dari April (0.53) ke Mei 2025 (0.81) – dihitung sebagai $((0.81 - 0.53) / 0.53) \times 100\%$ – diperkirakan menyebabkan penurunan jumlah wisatawan 19.02% (52.83% \times 0.36). Penurunan 220.600 dihitung dari 1.16 juta wisatawan April, mengestimasi jumlah wisatawan Mei 2025.

Rekomendasi Strategis

Optimalisasi Pengembangan Destinasi Prioritas dan KEK Pariwisata - Untuk merespons perlambatan sektor pariwisata awal 2025, pemerintah akan memfokuskan upaya pada pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Konsolidasi pembangunan infrastruktur, promosi, dan atraksi di kawasan ini akan mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing dan menarik investasi strategis.

Program Destinasi Pariwisata Regeneratif - Menjawab tekanan terhadap Bali dan Jakarta, program ini mendorong transformasi ke pariwisata berkualitas dengan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat umum. Pendekatan regeneratif menekankan keberlanjutan alih-alih hanya mengejar jumlah kunjungan.

Penguatan Hub Intra-Konektivitas - Penurunan kunjungan ke desa wisata hingga 70–75% akibat larangan *study tour* menandakan kerentanan terhadap ketergantungan segmen pasar tunggal. Diperlukan konektivitas antar destinasi, khususnya antara kota utama dan desa wisata, melalui integrasi transportasi dan paket wisata terpadu agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.

Redesain Kebijakan Infrastruktur dan Keselamatan

- Rentetan kecelakaan dan bencana alam di destinasi wisata menuntut penerapan standar keselamatan nasional untuk transportasi, wahana, bangunan, serta penerapan audit berkala. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu mengintegrasikan mitigasi risiko bencana untuk menjamin keberlangsungan operasional dan memulihkan kepercayaan wisatawan.



Kebijakan dan Program Mitigasi Jangka Pendek - Krisis okupansi vila resmi dan risiko geopolitik memerlukan respons lintas K/L yang cepat. Dibutuhkan forum atau sekretariat bersama di tingkat pusat-daerah untuk menyusun regulasi adaptif terhadap praktik ilegal dan merespons gejolak global secara terkoordinasi.

Pemberian Insentif Fiskal bagi Industri Pariwisata - Dengan lebih dari 50% hotel mengalami penurunan pendapatan dan 88% bersiap PHK, relaksasi pajak, subsidi operasional, dan insentif lainnya sangat krusial agar pelaku usaha dapat mempertahankan pekerja serta keberlangsungan usahanya.

Investasi Berkelanjutan pada Sumber Daya Manusia (SDM) - Belum meratanya kualitas SDM di sektor hotel dan restoran harus dijawab dengan program pelatihan ulang, sertifikasi, dan digitalisasi layanan. Investasi ini bukan hanya mitigasi jangka pendek, tetapi juga fondasi untuk membangun SDM yang tangguh dan profesional.



Tim Penulis

Asisten Deputi Manajemen Strategis
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Kementerian Pariwisata

Penanggungjawab:
I Gusti Ayu Dewi Hendriyani

Penulis:

1. Patriona Melodia Vanga
2. Lanina Adna Berlian Damayanti
3. Annisa Eka Putri
4. Fahri Surya Altakwa
5. Aulia Rachman Alfahmy

Editor:

1. Mahardika Beriandaldo
2. Herbin Saragi

ISSN 3090-9287

